



**SEKRETARIAT
KABINET**

Pusat Pembinaan Penerjemah
Pusbinter
-Setkab-

LAPORAN FORUM
KONSULTASI PUBLIK
TAHUN 2022

**Pusat Pembinaan Penerjemah
Sekretariat Kabinet**



**SEKRETARIAT
KABINET**



LAPORAN FORUM
KONSULTASI PUBLIK
TAHUN 2022

**Pusat Pembinaan Penerjemah
Sekretariat Kabinet**

DAFTAR ISI

Cover Laporan	i
Daftar Isi	ii
Daftar Lampiran	iii
Kata Pengantar	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. 1. Latar Belakang	1
1. 2. Dasar Hukum	3
1. 3. Tujuan dan Manfaat	3
1. 4. Ruang Lingkup	4
1. 5. Metode Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	4
BAB II PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK	6
2. 1. Identifikasi Masalah	6
2. 2. Analisis	6
2.2.1. Efektivitas Pelaksanaan Uji Kompetensi	6
2.2.2. Metode dan Instrumen Uji Kompetensi	7
2. 3. Rencana Aksi	9
BAB III PENUTUP	11

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Berita Acara Forum Konsultasi Publik	12
Lampiran II Daftar Hadir Forum Konsultasi Publik	14
Lampiran III Surat Undangan Forum Konsultasi Publik	24
Lampiran IV Dokumentasi Forum Konsultasi Publik	39

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik Pelayanan Pembinaan Jabatan Fungsional Penerimaan. Sebagai dokumen penting hasil Forum tersebut kami tuangkan dalam laporan ini. Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Forum Konsultasi Publik merupakan mandat yang diberikan kepada Pusat Pembinaan Penerimaan selaku unit penyelenggara pelayanan publik yang bertujuan mengumpulkan data, informasi dan masukan sebagai bahan monitoring dan evaluasi dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan penerapan kebijakan pembinaan JFP di instansi pemerintah.

Dengan terselenggaranya Forum Konsultasi Publik, kami berharap semua pemangku kepentingan turut berperan aktif dalam memberikan saran dan masukan yang membangun guna perbaikan dan penyempurnaan pelayanan pembinaan Jabatan Fungsional Penerimaan sehingga tercipta layanan publik yang baik dan prima sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.



Jakarta, 15 November 2022
Kepala Pusat Pembinaan Penerimaan

Wahyu Utami
Wahyu Utami

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Pelayanan publik selalu berkaitan dengan pemenuhan kepentingan dan kebutuhan masyarakat luas dimana Unit Penyelenggara Pelayanan Publik berkewajiban untuk memberikan layanan kepada masyarakat atau pemangku kepentingan layanan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Lebih lanjut Undang-Undang tersebut mengatur bahwa, Unit Penyelenggara Pelayanan Publik memiliki peranan penting dalam memberikan layanan publik yang baik dan prima bagi seluruh masyarakat atau pemangku kepentingan, yang ruang lingkup kegiatan pelayanan publik, yakni bagi warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang baik dan prima dengan memenuhi layanan agar sesuai antara hasil dan harapan serta sesuai dengan standar pelayanan telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 39 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Jabatan Fungsional Penerjemah.

Namun demikian, dalam proses penyelenggaraan layanan tersebut seringkali muncul permasalahan seperti adanya perbedaan antara kinerja yang diharapkan dengan praktek sehari-hari, perbedaan antara tuntutan kebutuhan masyarakat atau pemangku kepentingan dengan kemampuan layanan penyelenggara, dan perbedaan antara ketersediaan anggaran dengan kebutuhan riil anggaran untuk operasional kegiatan pelayanan.

Oleh karena itu, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa harus ada pelibatan, ruang terbuka bagi masyarakat untuk berpartisipasi, dan koordinasi yang dinamis antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat atau pemangku kepentingan agar pelayanan publik dapat terselenggara dengan baik.

Selain itu, pelayanan publik juga dapat menjadi ukuran paling sederhana untuk melihat sejauh mana capaian kinerja unit layanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam hal ini, kinerja aparatur negara sebagai representasi pelayan publik mempunyai dampak yang luas dalam membentuk persepsi tingkat kepuasan dan kepercayaan publik.

Apabila sebagai penyelenggara maupun pelaksana pelayanan publik dapat memberikan pelayanan publik yang baik dan prima kepada masyarakat atau pemangku kepentingan, maka persepsi tingkat kepuasan dan kepercayaan publik akan tinggi. Demikian juga sebaliknya, apabila sebagai penyelenggara maupun pelaksana pelayanan publik kurang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat atau pemangku kepentingan, maka persepsi tingkat kepuasan dan kepercayaan publik pun juga rendah atau kurang.

Oleh karena itu, Forum Konsultasi Publik (FKP) diselenggarakan sebagai sarana untuk menjaring aspirasi masyarakat atau pemangku kepentingan guna peningkatan kualitas pelayanan publik. FKP juga menjadi media evaluasi kinerja aparatur negara sehingga diharapkan akan terjadi peningkatan pada kinerja pelayanan oleh aparatur negara. Di samping itu, penyelenggaraan FKP juga diharapkan dapat menjadi wadah untuk membangun partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan peraturan atau kebijakan pelayanan publik. Dengan demikian diharapkan dapat mengurai permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan publik antara pemerintah dan masyarakat sekaligus sebagai sarana menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pemerintah.

1. 2. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 3) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penerjemah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2016;
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
- 6) Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet sebagaimana diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2022.

1. 3. Tujuan dan Manfaat

- 1) Tujuan
 - a. Menghimpun aspirasi, harapan, informasi dan masukan sebagai bahan monitoring dan evaluasi dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan penerapan kebijakan pembinaan JFP di instansi pemerintahan;
 - b. Menyamakan persepsi dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat atau pemangku kepentingan dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat/pemangku kepentingan.

2) Manfaat

Manfaat dilaksanakannya Forum Konsultasi Publik secara umum adalah untuk menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan masyarakat atau pemangku kepentingan untuk mitigasi dampak kebijakan bagi masyarakat atau pemangku kepentingan.

1. 4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan Forum Komunikasi Publik adalah dialog, diskusi, pertukaran pemikiran secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan masyarakat atau pemangku kepentingan untuk meningkatkan pelayanan pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah.

1. 5. Metode Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

Kegiatan Forum Konsultasi Publik telah dilaksanakan oleh Pusat Pembinaan Penerjemah selaku unit penyelenggara pelayanan publik secara kombinasi (*hybrid*), yaitu secara daring melalui *zoom meeting* dan format luring pada tanggal 24 Oktober 2022 bertempat di Harris Vertu Hotel, Jakarta.

Forum Konsultasi Publik tahun 2022 dikemas dengan rangkaian kegiatan Bimbingan Teknis Pengembangan Karier Jabatan Fungsional Penerjemah dengan salah satu temanya “Evaluasi Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penerjemah”. Hal ini merupakan upaya Pusat Pembinaan Penerjemah dalam merespon perkembangan kebijakan nasional atau dinamika organisasi.

Pihak-pihak yang mengikuti kegiatan Forum Konsultasi Publik, antara lain:

- 1) Pejabat Fungsional Penerjemah;
- 2) Perwakilan instansi pengguna Pejabat Fungsional Penerjemah;
- 3) Perwakilan organisasi profesi Ikatan Penerjemah Pemerintah Indonesia (IPPI);

- 4) Pakar atau Akademisi bidang penerjemahan; dan
- 5) Pejabat terkait di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Adapun jadwal acara kegiatan Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan oleh Pusat Pembinaan Penerjemah, sebagai berikut:

Tabel Jadwal Kegiatan FKP

No.	Materi/Susunan Kegiatan	Waktu (WIB)	Pelaksana/Narasumber
1.	Registrasi Kegiatan	08.30 – 09.30	Pelaksana, narasumber dan peserta
2.	Sambutan dan Pembukaan FKP sekaligus Penandatanganan Maklumat Pelayanan Pembinaan JFP	09.30 – 10.00	Bapak Farid Utomo Deputi Bidang Administrasi
3.	Materi: Tes Sertifikasi Nasional Himpunan Penerjemah Indonesia (TSN HPI) dan Diskusi	10.00 – 12.00	Bapak Dr. Sugeng Hariyanto, S.Pd., M.Pd, Dosen Politeknik Negeri Malang yang juga merupakan anggota Tim KKS HPI
4.	Istirahat, sholat, makan siang	12.00 – 13.30	
5.	Materi: Evaluasi dan Penyempurnaan Uji Kompetensi JFP dan Diskusi	13.30 – 16.30	Narasumber panel: Ibu Dr. Ida Kusuma Dewi, S.S., M.A., Dosen Fakultas Ilmu Budaya, UNS Bapak Rasmus Budhyono, M.Hum., Dosen Fakultas Ilmu Budaya, UNPAD
6.	Penutupan	16.30	Pelaksana, narasumber dan peserta

BAB II

PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

2. 1. Identifikasi Masalah

Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik menghasilkan beberapa identifikasi masalah dalam pelaksanaan layanan pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah, khususnya terkait dengan pelaksanaan uji kompetensi, sebagai berikut:

- 1) Se jauh mana efektivitas uji kompetensi dapat menjamin kualifikasi PFP memiliki kompetensi sesuai jabatan yang akan didudukinya?;
- 2) Se jauh mana efektivitas metode dan instrumen uji kompetensi?

2. 2. Analisis

2. 2.1. Efektivitas Pelaksanaan Uji Kompetensi

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penerjemah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2016, mengamanatkan kepada Sekretariat Kabinet selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penerjemah (JFP) untuk menyelenggarakan Uji Kompetensi JFP guna penjaminan kualitas dan profesionalitas Penerjemah.

Kelulusan Uji Kompetensi merupakan salah satu syarat kenaikan jabatan bagi Pejabat Fungsional Penerjemah (PFP). Prasyarat kelulusan tersebut merupakan upaya untuk menjamin bahwa setiap calon pemangku jabatan yang akan menduduki

jabatan lebih tinggi telah menguasai kompetensi yang diperlukan untuk menduduki jabatan tersebut.

Upaya penjaminan mutu PFP juga sejalan dengan kebutuhan pemerintah untuk dapat menyajikan hasil terjemahan sebagai informasi yang akurat, jelas, dan berterima kepada publik. Guna mendukung suksesnya pelaksanaan program-program pemerintah, PFP diharapkan memiliki kompetensi penerjemahan yang andal untuk turut mendiseminasikan regulasi pemerintah di tingkat internasional tentang potensi sumber daya alam, potensi perdagangan, investasi, pariwisata, keragaman suku bangsa, bahasa, budaya, dan kuliner. Selain itu, PFP juga dapat turut serta melestarikan budaya bangsa melalui penerjemahan karya-karya sastra daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, uji kompetensi menjadi instrumen penting untuk mengukur kompetensi PFP sesuai dengan jenjang jabatannya. Dengan demikian, PFP yang telah lulus uji kompetensi untuk ditugaskan di suatu jenjang jabatan tertentu merupakan PFP yang kompeten dan andal sesuai dengan kebutuhan kompetensinya.

3. 2.2. Metode dan Instrumen Uji Kompetensi

Dalam rangka menjaga kualitas dan meningkatkan kompetensi PFP melalui mekanisme uji kompetensi yang merupakan salah satu instrumen pengukur kompetensi PFP, diperlukan metode dan instrumen pelaksanaan uji kompetensi yang terukur, untuk menghasilkan PFP yang kompeten dan andal sesuai dengan jenjang jabatannya. Guna mewujudkan kondisi di atas, Pusat Pembinaan Penerjemah perlu melakukan evaluasi metode dan instrumen uji kompetensi yang telah digunakan selama ini. Hal ini sebagai upaya yang dilakukan oleh Pusat Pembinaan Penerjemah dalam merespon perkembangan kebijakan nasional,

dinamika organisasi, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang penerjemahan.

Sejauh ini, pelaksanaan uji kompetensi diselenggarakan melalui 3 jenis pengujian untuk mengidentifikasi kemampuan berpikir dan keahlian berbahasa mulai dari jenjang jabatan yang rendah hingga jenjang jabatan yang tinggi. Adapun 3 jenis pengujian, yaitu:

a. Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) Adaptif Merdeka

UKBI diikuti oleh seluruh peserta ujian dengan standar kelulusan yang memiliki tingkatan berbeda untuk setiap pelaksanaan uji kompetensi sesuai dengan jenjang jabatannya.

b. Uji *English Proficiency Test (EPT)*

EPT adalah uji kemahiran berbahasa Inggris yang tingkat kesulitannya setara dengan TOEFL. Ujian ini diikuti oleh seluruh peserta dengan kriteria standar kelulusan lebih rendah bagi peserta berlatar belakang bahasa asing non bahasa Inggris dibandingkan dengan peserta berlatar belakang bahasa Inggris.

c. Uji Kompetensi Penerjemahan Tulis

Uji Kompetensi Penerjemahan Tulis dilaksanakan dalam bahasa tertentu sesuai dengan penguasaan bahasa peserta ujian.

Proses pengujian melibatkan pakar atau praktisi di bidang penerjemahan, dengan standar penilaian uji kompetensi yang ditetapkan oleh pakar atau praktisi penerjemahan tersebut.

Selanjutnya, seiring dengan dinamika perubahan kebijakan nasional dan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang penerjemahan, melalui Forum Konsultasi Publik diperoleh beberapa poin masukan dari para peserta guna perbaikan dan penyempurnaan metode dan instrumen uji kompetensi mendatang, sebagai berikut:

- 1) Uji Kompetensi yang baik harus memiliki 4 unsur yaitu *Validity* guna mengukur pola yang seharusnya diukur, *Reliability* atau

dapat diandalkan karena konsisten dalam pengukuran kemampuan, *Objectiveness* dengan tidak melibatkan opini pribadi dan bias dari penilainya, dan *Practicallity* atau mudah untuk digunakan;

- 2) Uji Kompetensi seyogianya dilaksanakan dengan metode yang sama minimal dalam 1 tahun pelaksanaan kegiatan;
- 3) Uji Kompetensi idealnya dilaksanakan dengan melibatkan para penerjemah yang sudah memiliki kompetensi melakukan pengujian dan memahami proses bisnis dalam dunia penerjemahan.

Berdasarkan identifikasi masalah dan analisis masalah di atas, dapat disimpulkan bahwa:

- 1. *Belum terdapat standarisasi uji kompetensi yang efektif dijadikan pedoman baku yang meliputi unsur-unsur penilaian validity, reliability, objectiveness, dan practicality;***
- 2. *Belum optimal dan konsistennya penerapan metode dan instrumen uji kompetensi.***

2. 3. Rencana Aksi

FKP diawali dengan mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pelayanan pembinaan JFP melalui analisis permasalahan. Selanjutnya dalam forum ini dirumuskan rencana aksi sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel Rencana Aksi

Identifikasi Masalah	Rencana Aksi	Jangka Waktu Penyelesaian
<p>Belum terdapat standarisasi uji kompetensi yang efektif dijadikan pedoman baku yang meliputi unsur-unsur penilaian validity, reliability, objectiveness, dan practicality</p>	<p>Melakukan pembahasan secara mendalam dengan para pakar dan/atau praktisi di bidang penerjemahan guna merumuskan standarisasi, metode dan instrumen uji kompetensi yang efektif sesuai dengan kebutuhan kompetensi JFP</p>	<p>Januari s.d. Maret 2023</p>
<p>Belum optimal dan konsistennya penerapan metode dan instrumen uji kompetensi</p>		

BAB III PENUTUP

Forum Konsultasi Publik Pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah Tahun 2022, yang diselenggarakan oleh Pusat Pembinaan Penerjemah, telah mengidentifikasi permasalahan layanan pembinaan PFP khususnya terkait uji kompetensi, yaitu belum terdapat standarisasi uji kompetensi yang efektif dijadikan pedoman baku yang meliputi unsur-unsur penilaian *validity*, *reliability*, *objectiveness*, dan *practicality* dan belum optimal dan konsistennya penerapan metode dan instrumen uji kompetensi.

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas FKP merumuskan rencana aksi, yaitu melakukan pembahasan secara mendalam dengan para pakar dan/atau praktisi di bidang penerjemahan guna merumuskan standarisasi, metode dan instrumen uji kompetensi yang efektif sesuai dengan kebutuhan kompetensi JFP.

Rencana aksi tersebut sebagai bentuk upaya Pusat Pembinaan Penerjemah dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan kebijakan pelaksanaan pembinaan JFP, khususnya terkait layanan uji kompetensi PFP yang berkualitas.

Lampiran I
Laporan Forum Konsultasi Publik Tahun 2022



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

BERITA ACARA
FORUM KONSULTASI PUBLIK
PUSAT PEMBINAAN PENERJEMAH SEKRETARIAT KEBINET
Jl. Veteran No. 18, Jakarta Pusat, Indonesia 10110

Pada hari ini, Senin, 24 Oktober 2022, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Pelayanan Pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah oleh Pusat Pembinaan Penerjemah Sekretariat Kabinet. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut:

Identifikasi Masalah	Rencana Aksi	Jangka Waktu Penyelesaian
Belum terdapat standarisasi uji kompetensi yang efektif dijadikan pedoman baku yang meliputi unsur-unsur penilaian <i>validity</i> , <i>reliability</i> , <i>objectiveness</i> , dan <i>practicality</i>	Melakukan pembahasan secara mendalam dengan para pakar dan/atau praktisi di bidang penerjemahan guna merumuskan standarisasi, metode dan instrumen uji kompetensi yang efektif sesuai dengan kebutuhan kompetensi JFP	Januari s.d. Maret 2023
Belum optimal dan konsistennya penerapan metode dan instrumen uji kompetensi		

Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, dan jangka waktu penyelesaian, serta berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.





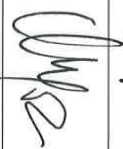
Kepala Pusat Pembinaan Penerjemah
Sekretariat Kabinet,



Sri Wahyu Utami




Lampiran
Berita Acara Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik



No.	Nama	No. HP	Jenis Kelamin (L/P)	Perwakilan (Instansi/Organisasi)	Tanda Tangan
1	Aba Subagya			Kemigas	
2	Marhaeni Diah			BKN	
3	Dewi Indrayanti			Kemerkumham	
4	Penni Rusman			Kemkominfo	
5	Emma Nabeha			Pustanda Badan Badan Kementekristen	
6	Harmy F. Fauzrah			Kementerian ESDM	
7	Rita Komariah			Setjen DPRRI	
8	YANOS DEPERANS			IPPI	
9	Agus Sapani			IPPI	
10	Didin Syayidin			BNPT	
11	SRI MULYANI . M			BADAN PENGHUBUNG RIAU	
12	Wulan Mahariani			Kementerian Kominfo	
13					











DAFTAR HADIR
Kegiatan Bimbingan Teknis
Pengembangan Karier Jabatan Fungsional Penerjemah
24 Oktober 2022, Hotel Harris Vertu, Harmoni, Jakarta





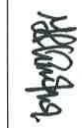

No	Nama	Jabatan	Instansi	Tanda Tangan
1.	YANUS OKTARA	Ketua	IPPI	
2.	Aprizal	PHB	Bahub Piar	
3.	Ayu Wulandari	PPP Setiab	Setiab	
4.	Ditzy Aksella W	PPP KLHK	KLHK	
5.	Muayina Megasan	PPP ANRI	ANRI	
6.	Monica I. Bendatu	Penerjemah Pertama	ANRI	
7.	Shi Widadi	Penerjemah Muda	Kominfo	
8.	Magista D.F	Penerjemah Pecans	Lemhannas	











No	Nama	Jabatan	Instansi	Tanda Tangan
9.	Yuyu Mulyani	Asdep Naster		
10	ARI ASWINI G.	Kesdespan PUKH		
11	Rara Firlina	Humas		
12	Wahar Santia	DPP	PEKRI, kemhub	
13	Heidy P	AKR3	CATOL	
14	Rachmat RA	Biro umum	SencaG	
15	HERI S	Biro Humas	SETRA	
16	Yunita	Biro AKR3		
17	Tolar Rotih	Biro AKR3	Setkab	
18	Sri Andini	--	Setcab	

No	Nama	Jabatan	Instansi	Tanda Tangan
19	M. MUSYA. S	AKRB	SETKAS	
20	SRI MUKHTAR	PERGEMAH AHLI MUDA	BADAN PENGHUBUNG PRO. KAWA	SR
21	Sarif	AKRB	SETKAS	
22	Amanda Popitz Sari	KemenPPA (Penerjemah)	KemenPPA	
23	Estu	Penerjemah pertama	Setkas	
24	Wulan Kurniasih	Penerjemah Ali Muk	Kemaseting	
25	Florentin Jenny	SPK Bicara Posing	Setcab	
26	Dyah Kusumawati	Sahli Polhuk	Setkas	
27	Dewi Indayanti S	JFT Kementan	Kementan	Dan
28	Agus Bahtar	JFT Kementan	Kementan	

No	Nama	Jabatan	Instansi	Tanda Tangan
29	Akhiruddin	Auditor Maya	Inspektorat	
30	Rita L	Analisis Iepes	Setjen DPR	Re
31	Pamri Kusman	Penyamaul Madhya	Kanwilfo	fa
32	Aref Setiyo	Psikologi	Setkum	
33	Titi Tika	Ruskin	SMEU	ti
34	Ferry Rathe	Bogian Program-KRIS	Setkab	Sup
35	Yusuf Setiawan	Adalah puskaha	DEKAB	st
	Hafiz Anugraji	Analisis Sistem Informasi & Jaringan	Pusatlin Setkab	Harif
	FOT		Perbinter	Ach
	Santosa Hooyu	Pengadal Data	Presenter	Ady

No	Nama	Jabatan	Instansi	Tanda Tangan
1	Noviana. A.	Penerjemah Pertama	ANRI	
2.	Dida S NH	Penerjemah Pertama	Setkab	
3.	Fanuzamanani J	Penerjemah Pertama	Setkab	
	Dwi Ariyani	Penerjemah Pertama	Lembhanna RI	
5	Agus Sapin'	Penerjemah Muda	BTKW - KRP	
6	R. Ratna S.	Penerjemah Madya	kemahub	
7	Didin Sugardin	Kerjasama Pertama	BNPT	
8	Teguh Iqbal	Humas	Setkab	
9	Zakia Liberty	Penerjemah Ahli: Muda	kemempertin	
10	Joko Hanigenta	Biro Umum	Setkab	

No	Nama	Jabatan	Instansi	Tanda Tangan
11	Adrian D	Leader PDB	Bis Lun Setuh	
12	Eny N.	Rispa Ani Nadi	Pusdat	
13	Holia	Prum nck	Ky Lhu	
14	Julius Vincent S.	stag ALRB	ALRB	
15	Rini W.F	stet ALKB	Setuh	
16	Fauzan Azima	Purdah	SETMS	
17	Agung H. K.	JEP Ahli Muda	KUMHAM	
18	NATIL MARYANSARY	SMHL NB	SMHL	
19	Hanny F. Fauziah	JEP Ahli Muda	Ditjen Negeri- KESDM	
20	Rokhifah R.	JEP Ahli Pertama	Kerembukhan	

No	Nama	Jabatan	Instansi	Tanda Tangan
21.	Muthari Diah <	Analisis Kap Medis	BKMN	
22	Barua Nababes	<u>Keuangan & Pajak</u> Kor. KKP Pengajaran's Pustawan	<u>Badan Belanja</u>	
23	Henry Naitoh	Karo SPMT	Setkab	
24.	Henry Gallo	Karub Tata Laksana	--	
25.	Dana. A	Staf SPMT	--	
26.	Ratna. p.	Pustaker	Setkab	
27.	RamaDhanuia Ritrik.	Pustaker	Setkab.	
28.	Boogie D.N.P	Roum	Setkab	
29	Lutf Fauzan	Roum	Setkab	
30	M. FRSAN		Setkab	

No	Nama	Jabatan	Instansi	Tanda Tangan
	Ruzeky		Resbimar	
	Tos Radean		BRSB Inter	
	Fidel S. Wami		Pulbanta	

Lampiran III
Laporan Forum Konsultasi Publik Tahun 2022



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B. 1195 /PUSBINTER/10/2022
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Undangan Bimbingan Teknis

Jakarta, 19 Oktober 2022

Kepada Yth.
Pimpinan Unit Kerja
Pengguna Penerjemah
pada Daftar Terlampir
di
Tempat

Dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan kompetensi secara berkelanjutan bagi para Pejabat Fungsional Penerjemah (Penerjemah), dengan hormat kami sampaikan bahwa selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penerjemah, Sekretariat Kabinet akan menyelenggarakan serangkaian kegiatan sebagai berikut.

1. Bimbingan teknis dan penandatanganan maklumat pelayanan Pembinaan JFP, yang akan dilaksanakan secara luring dan daring pada Senin, 24 Oktober 2022 di Hotel Harris Vertu, Jalan Hayam Wuruk No. 6, Jakarta 10120, sebagaimana jadwal terlampir, dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Keikutsertaan Penerjemah secara luring diperuntukkan bagi 25 orang peserta perwakilan instansi pemerintah pusat dengan pendaftaran keikutsertaan dapat disampaikan melalui aplikasi Elektronik Jabatan Fungsional Penerjemah (E-JFP).
 - b. Pusbinter akan menyampaikan surat panggilan Penerjemah yang ditunjuk untuk mewakili instansi berdasarkan pendaftaran pada E-JFP. Biaya transportasi dan uang saku *full day* Penerjemah kiranya dapat ditanggung oleh instansi pengirim.
 - c. Penerjemah yang tidak dapat mengikuti bimtek secara luring, dipersilahkan mengikuti secara daring melalui tautan yang akan kami sampaikan 1 hari sebelum pelaksanaan kegiatan.
2. *Webinar Series*, yang akan dilaksanakan setiap Selasa dan Kamis pada tanggal 25 Oktober s.d. 8 November 2022 dengan menghadirkan pakar kebahasaan, penerjemahan, dan pengalihaksaraan, sebagaimana jadwal terlampir.

Seluruh Penerjemah yang mengikuti bimtek dan *webinar series* akan menerima sertifikat keikutsertaan pada setiap sesi yang diikuti. Mengingat pentingnya kegiatan Bimtek tersebut, mohon kiranya Bapak/Ibu pimpinan unit kerja dapat menugaskan para Penerjemah sebagaimana tercantum pada Lampiran II kolom 4 untuk mengikuti seluruh sesi Bimtek dimaksud.

Atas perhatian dan kerja sama baik yang diberikan, kami sampaikan terima kasih.



Kepala Pusat Pembinaan Penerjemah
Sekretariat Kabinet,

Sri Wahyu Utami

Tembusan Yth.:
Deputi Bidang Administrasi

Lampiran II Surat
 Kepala Pusat Pembinaan Penerjemah
 Nomor : B. 1175 /PUSBINTER/10/2022
 Tanggal : 09 Oktober 2022

DAFTAR LAMPIRAN PEJABAT FUNGSIONAL PENERJEMAH

NO	PIMPINAN UNIT KERJA	INSTANSI	PENERJEMAH
1	2	3	4
1.	Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan	Sekretariat Kabinet RI	Ratih Nurdianti, S.H., LL.M.
2.			Rahmi Yuliastri, S.Pd., M.A.
3.			Lulu Wuliarti, S.S., M.A
4.			Drs. Hardyanto, M.P.A., M.A.
5.			Syarif Hidayatullah, S.S., M.A.L.L.C.
6.			Ayu Wulandari, S.S., M.W.L.
7.			Dr. Muhammad Ersan Pamungkas, S.S., M.A.
8.			Mia Medyana Bonaedy, S.Hum., M.A.
9.			Ari Aswin Gunadi, S.S., M.Tran.
10.			Muhardi, S.S.
11.			Ahmad Yusuf, S.S., MTI.
12.			Anindya Putri Novitasari, S.IP.
13.			Rany Anjany Subachrum, S.Hum.
14.			Ridwan Ibadurrohman, S.S.
15.			Estu Widyamurti, S.Hum.
16.			Galuh Wicaksono Hidayat, S.Hum.
17.			Fairuzzamani Inayatillah, S.S.
18.			Syarifah Aisyah, S.S.
19.			Dida Syarifa Nursyamsi Hilaman, S.Hum.
20.			Alfhatin Pratama, S.Hum.
21.	Kepala Biro Hubungan Masyarakat	Kementerian Sekretariat Negara	Wulan Kurniasih, S.Pd., M.App.Ling.
22.			Juli Andriana Siboro, S.S.
23.	Direktur Politeknik Negeri Pontianak	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Riszqie Naskiah Na'im, S.Hut.

Kepala...

NO	PIMPINAN UNIT KERJA	INSTANSI	PENERJEMAH	
1	2	3	4	
24.	Kepala Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Dra. Emma Lintje Margaretha Nababan	
25.			Ni Putu Ayu Widari, S.Pd.	
26.			Theya Wulan Primasari, S.Pd.	
27.			Yolanda Putri Novytasari, S.Pd.	
28.			Choris Wahyuni, S.Pd.I., M.Pd.I.	
29.			Susani Muhamad Hatta, S.S.	
30.			Larasati, S.Pd.	
31.			Putriasari, S.Pd.	
32.			Dyah Retno Murti, S.Pd.	
33.			Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar	Dra. Andi Maryam
34.			Kepala Balai Bahasa Sumatra Utara	Yolferi, S.S., M.Hum.
35.			Kepala Balai Bahasa Sumatra Selatan	Sri Vidia Fika, S.Pd.
36.				Mulawarman, S.S.
37.				Ahmad Nawari, S.Pd., M.A.
38.	Kepala Balai Bahasa Riau	Yalta Jalinus, S.Pd., M.Pd.		
39.		Noezafri Amar, S.S., M.Pd.		
40.	Kepala Balai Bahasa Kalimantan Selatan	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Wahdanie Rakhman, S.S.	
41.			Siti Alfa Ariesty, S.S.	
42.			Mohamad Azhar Rasjid, S.S.	
43.	Kepala Balai Bahasa Jawa Barat		Taufiq Awaludin, S.S.	
44.			Desie Natalia, S.S.	
45.			Devyanti Asmalasari, S.S., M.Pd.	
46.	Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah		Ika Inayati, S.S.	
47.			Kahar Dwi Prihantono, S.S.	
48.			Hero Patrianto, S.S.	
49.			Awaludin Rusiandi, M.A.	
50.	Kepala Balai Bahasa Jawa Timur		Dalwiningsih, S.Pd.	
51.			Khoiru Ummatin, S.Pd.	
52.			Amin Mulyanto, S.S.	
53.	Kepala Balai Bahasa Bali		Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	I Nyoman Sutrisna, S.S.
54.		Ni Putu Ayu Krisna Dewi, S.S.		
55.	Kepala Balai Bahasa Papua	Abdullah Sani, S.Pd.		
56.		Ratna Mala Sukma, S.S.		
57.	Kepala Balai Bahasa Kalimantan Tengah	Septiana Delaseniati, S.Pd		
58.		Rensi Sisilda, S.S.		

Kepala...

NO	PIMPINAN UNIT KERJA	INSTANSI	PENERJEMAH	
1	2	3	4	
59.	Kepala Balai Bahasa Sulawesi Utara	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Anas Yuliadi Nurdin, S.S.	
60.			Irene Debby Carolina Rindorindo, S.S.	
61.			Marike Ivone Onsu, S.S.	
62.	Kepala Kantor Bahasa Gorontalo		Mohammad Rosadi, S.S.	
63.	Kepala Kantor Bahasa Provinsi Jambi		Lukman, S.Pd.	
64.			Yarmalus, S.Pd.	
65.			Sabdanur, S.Ag.	
66.			Ilsa Dewita Putri Soraya, S.S., M.A.	
67.			Zumalal Laeli, S.S.	
68.			Rahmadina, S.Ag.	
69.			Wessa Ostika Utami, S.S.	
70.	Kepala Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara		Dwi Pratiwi S. Husba, S.Pd.	
71.	Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau		Laila Kurniawaty, S.Pd., M.A.	
72.			Raja Rachmawati, S.Pd.	
73.			Faisal Gazali, S.S.	
74.			Fatmala Sari Oktaviani, S.Pd.	
75.	Kepala Kantor Bahasa Kalimantan Timur		Muhammad Erwin Darma, S.Pd.	
76.	Kepala Kantor Bahasa Maluku		Evi Olivia Kumbangsila, S.Pd.	
77.	Kepala Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat		I Nyoman Cahyasabudhi Santosa, S.Pd.	
78.			Safoan Abdul Hamid, S.Pd.	
79.			Toni Samsul Hidayat, M.Pd.	
80.			Zamzam Hariro, S.Pd., M.Pd.	
81.	Kepala Biro Hubungan Masyarakat		Kementerian Sosial RI	Karlina Irsalyana, S.S.
82.	Sekretaris Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (Events)		Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Aiesa Qonita Mar'ati, S.S
83.	Kepala Biro Komunikasi, Sekretariat Kementerian		Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Maya Apriliani Aria Kusnani, S.S.
84.	Kepala Biro Umum, Hukum, dan Pengadaan			Fitri Sumirah, S.S.
85.				Dwi Arifina Putri, S.S
86.	Direktur Pemasaran Pariwisata Regional II		Tri Martiningsih, S.S, M.M.	
87.	Kepala Balai Besar Kimia dan Kemasan		Kementerian Perindustrian	Margaretta Charolyna, S.E., M.M.
88.	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Industri			Eko Priyo Purnomo, S.S., M.Med.Kom.
89.	Kepala Biro Hubungan Masyarakat	Arief Febriant Putra, S.Hum		
90.	Direktur Ketahanan dan Iklim Usaha Industri	Zakia Liberty, S.H.,LL.M.		

Sekretaris...

NO	PIMPINAN UNIT KERJA	INSTANSI	PENERJEMAH
1	2	3	4
91.	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Agung Purnomo, S.S.
92.	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri		Agus Sapari, S.T, M.Envir.Sc.
93.	Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anninda Nurul Islami, S.S.
94.	Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal		Dra. Ria Mutiara
95.	Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim		Ditsy Aksella Widianingrum, S.ST
96.	Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja sama	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI	Agung Hestusubekti Kurniawan, S.H.
97.	Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual		Andria Puji Kesuma, S.S.
98.			Risa Sukmawardani, S.S.
99.			Wulandari, S.Hum.
100.			Ika Nurita Novianty, S.S.
101.			Galang Aprilian, S.S.
102.			Ida Ayu Ria Utami Saraswati, S.S.
103.			Mayang Prameswari, S.Hum.
104.		Direktur Jendral Peraturan Perundang-undangan	Rokhimah Rokhimus Sofyan, S.S.
105.	Dewi Indrayanti Savitri, S.S.		
106.	Agus Bachtiar, S.S.		
107.	Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi	Yanos Okterano, S.S., M.A.	
108.		Yessy Successly, S.Hum.	
109.		Arum Apriyana, S.S.	
110.	Direktur Teknologi Informasi dan Kerja Sama, Direktorat Jenderal Pemasarakatan	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Catur Santi Darini, S.H.
111.	Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah		Meindika Wiweka Hartri, S.S.
112.	Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi		Sularsih, S.S.
113.		Enny Ingketria, S.S.	
114.	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Hanny Fariany Fauziah, S.S.
115.	Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerjasama		Irma Yulianti, S.S.

Sekretaris...

NO	PIMPINAN UNIT KERJA	INSTANSI	PENERJEMAH
1	2	3	4
116.	Sekretaris Direktorat Jenderal EBTKE	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Alfi Kurnianingsih, S.Hum.
117.	Sekretaris Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Erik Limantara, S.S.
118.	Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim		Penni Patmawati Rusman, S.S.
119.			Sri Widadi, S.pd, M.Hum
120.	Direktur Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum dan Keamanan		Wilda Stiana, S.S.
121.			Filmon Leonard Warouw, S.S., MComn.
122.	Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan		Sugiarti, S.Hum.
123.	Direktur Pengelolaan Media		Siti Chodijah, S.Hum.
124.			Wisnu Wardoyo, S.S.
125.	Kepala MMTC Yogyakarta		Ratri Nugrahini, S.Pd.
126.	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Dra. Arum Gayatri
127.	Kepala Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional		Kementerian Perhubungan RI
128.		Ikrar Saputra, S.S	
129.	Direktur Jenderal Perhubungan Darat	Ririn Scorviyanti, S.Pd., M.M.Tr.	
130.		Elsa Surya, S.S., M.Si.	
131.	Kepala Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kepegawaian, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam	Kementerian Agama	Nanik Rahmawati, S.Pd.I.
132.	Kepala Seksi Bimas Islam KanKementerian Agama Kab. Tanah Datar		Muhammad Abrar Ali Amran, Lc, MA
133.		Kementerian Pertanian	Huda Mahmuda, S.Hum.
134.	Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal		Rismawan Farid Lufianto, SS
135.			Mohamad Zaeni Tasripin, S. Hum
136.	Direktorat Jendral Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri	Wiwin Winanti, S.S.
137.	Direktur Institusi Pemerintahan Dalam Negeri		Kartika Dina Ashfira, S.S.
138.	Direktur Institusi Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Jakarta		Widyasanti Anawangsih Pirenaningtyas, S.S.
139.	Direktur Institusi Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sumatera Barat		Bima Eka Putra, S.S.

Kepala...

NO	PIMPINAN UNIT KERJA	INSTANSI	PENERJEMAH
1	2	3	4
140.	Direktur Institusi Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Utara	Kementerian Dalam Negeri	Edward Prambudi Susilo Handoko, S.S.
141.	Ketua Laboratorium Bahasa dan Komputer IPDN		Windi Noor Auliani Putri, S.S.
142.	Kepala Biro Administrasi Akademik dan		Marina Christmartha Aprilia Juliaan, S.Hum
143.	Perencanaan, Institusi Pemerintahan Dalam Negeri		Fairuz Rochma Yoni, S.Hum.
144.	Kepala Bagian Kerjasama dan Humas, Institusi Pemerintahan Dalam Negeri		Ajeng Pawestri, S.S
145.	Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	Kejaksaan RI	Hastie Kaharti, S.H.
146.	Kepala Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional	Dewan Perwakilan Rakyat RI	Andriaji Gumilar Laksanaputra, S.S.
147.			Martrisa Canda Chaniago, S.Pd.
148.			Novri Helmawan, S.Pd.
149.			Fasrudin Arief Budiman, S.S., M.Si.
150.			Abdul Muiz, S.Pd.
151.			Nurul Muttaqin, S.S.
152.			Yudi Chandri Setiawan, S.Pd.
153.	Kepala Biro Protokol, Humas, dan Media	Dewan Perwakilan Daerah RI	Athoillah El Anshory, S.S.
154.	Kepala Biro Persidangan I		Khairul Ahyadi, S.S.
155.	Kepala Biro Hukum dan Organisasi BMKG	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	Anton Sadewa Wicaksana, S.IP
156.	Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan	Mahkamah Agung RI	Johanes, S.S.
157.			Bintang Alvita Wahyuningtyas, S.S.
158.	Anjar Astriani, S.S.		
159.	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan dan Diklat Hukum dan Peradilan		Amrih Marsudi, S.S.
160.			Ratih Gumilang, S.Hum.
161.			Eneng Mina Nurhasanah, S.S.
162.	Kepala Biro Hukum dan Humas, Badan Urusan Administrasi		
163.	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Ikrar Adhitya Nugraha, S.S.
164.			Beryl Septiani Adji, S.Hum.

Kepala...

NO	PIMPINAN UNIT KERJA	INSTANSI	PENERJEMAH
1	2	3	4
165.	Direktur Layanan dan Pemanfaatan	Arsip Nasional RI	Rini Rusyeni, S.IP.
166.			Nugrahita Rizky, S.Hum.
167.	Direktur Pengolahan Arsip Nasional RI		Meyrina Megasari, S.Hum.
168.			Noviana Aqmarina, S.S.
169.			Monica Imanuela Bendatu, S.S.
170.	Kepala Biro Kerja Sama dan Hukum	Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia	Trias Noverdi, S.S., M.Hum,
171.	Kepala Biro Hubungan Masyarakat		Magista Dian Fitriia, S.Hum.
172.			Dwi Ariyani, S.Pd
173.	Direktur Materi dan Penilaian Peserta Pendidikan		Ana Susilowati, S.Pd.
174.	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum	Badan Pusat Statistik	Retno Indrawati SST. S.E., M.Sc., M.Eng
175.			Kristin Oktanita Tarigan
176.	Direktur Strategi Keamanan Siber dan Sandi	Badan Siber dan Sandi Negara	Adhit Pratama Putra, S.Hum.
177.			Dini Rifaati Hanifah, S.Hum.
178.	Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik	Badan Siber dan Sandi Negara	Bety Mawarni, S.S.
179.	Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi	Komisi Yudisial	Yuni Yulianita, S.S.
180.			Priskilla Siregar, S.Sos.
181.			Dinal Fedrian, S.IP., M.A.
182.	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Kementerian	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Amanda Puspita Sari, S. Hum.
183.	Kepala Biro Perencanaan, Hukum dan Hubungan Masyarakat	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	Didin Syayidin, S.Hum
184.	Direktur Deradikalisasi		Tutur Ahsanil Mustofa, S.Hum
185.	Direktur Kerjasama Regional dan Multilateral		Fitrah Febi Massofia, S.Hum
186.	Direktur Penindakan		Vidya Muthya Citra, S.S
187.	Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Andri, S.Pd.
188.	Kepala Biro Humas Protokol dan Penghubung, Sekretariat Daerah		Mayke Widi, S.Hum.
189.	Kepala Badan Penghubung Provinsi Riau	Pemerintah Provinsi Riau	Aprizal, S.S., M.Si.
190.			Sri Mulyani Mukhtar, S.S.
191.	Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Riau		Yerny Syafnida, S.S
192.			Rica Hartami, S.S.
193.	Kepala Dinas Pariwisata	Pemerintah Provinsi Sumatra Barat	Fivtinia Oktagusni, S.S.
194.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pemerintah Provinsi Sumatra Barat	Winda Dwi Melisa, S.S.

Kepala...

NO	PIMPINAN UNIT KERJA	INSTANSI	PENERJEMAH
1	2	3	4
195.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	Pemerintah Provinsi Bengkulu	Tedy Feriansyah, S.S.
196.	Kepala Biro Umum, Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu	Pemerintah Provinsi Bengkulu	Suceputra Sigunsa, S.S.
197.			Nina Farlina, S.S.
198.	Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Bengkulu		Erliana Hastuti, S.S., M.Si.
199.	Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu		Eva Mariaty, S.S.
200.			Ari Suprpti, S.S.
201.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP		Lellyana, S.S.
202.			Medi Setiabudi, S.S.
203.	Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB		Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
204.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pemerintah Provinsi Banten	Sofyan Effendi, S.Th.I.
205.			Hafid, S.Sos.I.
206.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dewi Ratih Rozana, S.S.
207.	Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian Pembangunan Daerah Kepulauan Bangka Belitung		Rusni Budiati, SIP., M.Sc., M.Eng
208.			Andini Sawitriana, S.S.
209.	Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan, dan Kepemudaan Olahraga		Adi Mishadi, S.S.
210.			Zelly Eliani, S.S.
211.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		Rita Eviyanti, S.S.
212.			Syekh Ahmad Sobri, S.S.
213.	Kepala Dinas Pendidikan		Maria Ulfah, S.S.
214.		Sophan Derryan Lintang, S.S.	
215.	Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Dian Sati, S.S.
216.			Novi Muharrami, S.S.
217.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Cylas Desidarius Rianantang, S.S.
218.	Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Setda Provinsi NTB	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat	Syafruddin, S.S.
219.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Kartika Suciati, S.S.
220.	Kepala Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi NTB		Winda Nugraheni, S.S.
221.	Kepala Biro Administrasi Pimpinan, Sekretariat Daerah	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Febrina Natalia, S.S., M.Sc.
222.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP		Gersom Leonardo Panjaitan, S.S.
223.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian		Teophilia Nugrahanny, S.S
224.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		Anne Angeline, S.S.

Kepala...

NO	PIMPINAN UNIT KERJA	INSTANSI	PENERJEMAH	
1	2	3	4	
225.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Victoria, S.S	
226.			Ana Rahmawati, S.S.	
227.	Kepala UPTD Taman Budaya, Dinas Kebudayaan	Provinsi Bali	I Gede Pariasa, S.S.	
228.	Kepala UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali, Dinas Kebudayaan	Provinsi Bali	A. A. Ayu Dwi Yuni Pritiari, S.S.	
229.	Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali		Ni Wayan Pering Muliawati, S.S.	
230.	Kepala Biro Administrasi Pimpinan	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	Agna Fadhly, S.S	
231.	Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo	Pemerintah Provinsi Gorontalo	Fera Mardaleny, S.S.	
232.	Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta	Pemerintah Provinsi DIY	Fathi Mustaqim, S.S., M.A., M.Journ.Comm.	
233.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	Endang Yunita Sari, S.S	
234.	Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan		Nurliah T, S.S	
235.	Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan		Muhammad Fadly, S.S	
236.			Silvia Nadjib, S.S	
237.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP		Tilly Wulandari, S.S	
238.			Fitriani Husain, S.S	
239.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika		Pemerintah Kota Probolinggo	Alfien Handiansyah, S.S.
240.	Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata			Hariyanti Agustina, S.S.
241.	Kepala Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol	Pemerintah Kota Semarang	Dian Afiana Purnama, S.S.	
242.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Pemerintah Kota Semarang	Diah Susanti Handayani, S.S.	
243.	Kepala Bagian Kerjasama	Pemerintah Kota Padang	Rama Andria, S.Sos., M.I.Kom.	
244.	Kepala Asisten Pemerintahan dan Kesra	Pemerintah Kota Bandung	Dhea Restu Pradhana, S.S.	
245.			Nadia Adelliani Ernanda, S.S.	
246.	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga	Pemerintah Kabupaten Kepahiang	Erni Martland Virantika Simbolon, S.S.	
247.	Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Pemerintah Kabupaten Sampang	Abdul Basith, S.Hum	

Kepala...

NO	PIMPINAN UNIT KERJA	INSTANSI	PENERJEMAH
1	2	3	4
248.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Setdakab Sampang	Pemerintah Kabupaten Sampang	Anandika Panca Nugraha, S.S.
249.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pemerintah Kabupaten Bangka Barat	Muhammad Erfan, S.S.
250.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti	Wenny Cahyasari Prihandina, S.S
251.			Novitania Putri, S.Hum
252.	Kepala Dinas Pariwisata	Pemerintah Kabupaten Natuna	Alhams Aamannu Firdaus, S.S
253.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Pemerintah Kabupaten Enrekang	Ninin Herlina, S.S
254.	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tolitoli	Pemerintah Kabupaten Tolitoli	Ika Merdekawati, S.S

Kepala Pusat Pembinaan Penerjemah
Sekretariat Kabinet,



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

MEMORANDUM

Nomor : M.0429 /PUSBINTER/10/2022
Tanggal : 19 Oktober 2022

Kepada Yth. : Para Pejabat pada Daftar Terlampir
Dari : Kepala Pusat Pembinaan Penerjemah
Perihal : Undangan Menghadiri Penandatanganan Maklumat Pelayanan dan
Bimbingan Teknis Pengembangan Karier Penerjemah

Dalam rangka pernyataan komitmen Sekretariat Kabinet selaku instansi Pembina Jabatan Fungsional Penerjemah untuk memberikan pelayanan publik yang prima berupa pembinaan JFP, dengan hormat kami sampaikan bahwa akan dilaksanakan Penandatanganan Maklumat Pelayanan Pembinaan JFP yang dilanjutkan dengan kegiatan Bimbingan Teknis Pengembangan Karier Penerjemah.

Sehubungan dengan hal itu, kami bermaksud mengundang Bapak/Ibu pimpinan unit kerja didampingi 1 orang pejabat/pegawai untuk turut menghadiri seremoni penandatanganan maklumat dimaksud yang dilanjutkan dengan keikutsertaan dalam bimbingan teknis, pada:

hari, tanggal : Senin, 24 Oktober 2022
waktu : 09.30-16.30 WIB
tempat : Hotel Harris Vertue, Jalan Hayam Wuruk No. 6, Jakarta 10120.

Mengingat pentingnya kegiatan tersebut, besar harapan kami kiranya Bapak/Ibu dapat menghadiri kegiatan dimaksud dengan biaya transportasi dan uang saku fullday ditanggung oleh unit kerja masing-masing.

Atas perhatian dan kerja sama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.


Sri Wahyu Utami

Tembusan:
Yth. Deputi Bidang Administrasi

Lampiran I Memorandum
Kepala Pusat Pembinaan Penerjemah
Nomor : M.0429/PUSBINTER/10/2022
Tanggal : 09 Oktober 2022

PEJABAT YANG DIKIRIMI MEMORANDUM

1. Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum
2. Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi
3. Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan
4. Kepala Biro Umum
5. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana
6. Kepala Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi
7. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Sekretariat Kabinet
8. Inspektur Sekretariat Kabinet

Jakarta, 09 Oktober 2022
Kepala Pusat Pembinaan Penerjemah,


Sri Wahyu Utami



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B.117 /PUSBINTER/10/2022
Sifat : Segera
Lampiran : 1 berkas
Perihal : **Undangan Menghadiri
Penandatanganan Maklumat
Pelayanan dan Bimtek**

Jakarta, 19 Oktober 2022

Kepada Yth.:
**Para Pejabat
pada Daftar Terlampir**
di
Tempat

Dalam rangka pernyataan komitmen Sekretariat Kabinet selaku instansi Pembina Jabatan Fungsional Penerjemah (JFP) untuk memberikan pelayanan publik yang prima berupa pembinaan JFP, dengan hormat kami sampaikan bahwa akan dilaksanakan Penandatanganan Maklumat Pelayanan Pembinaan JFP yang dilanjutkan dengan kegiatan Bimbingan Teknis Pengembangan Karier Penerjemah.

Sehubungan dengan hal itu, kami bermaksud mengundang Bapak/Ibu pimpinan unit kerja atau yang mewakili untuk turut menghadiri seremoni penandatanganan maklumat dimaksud yang dilanjutkan dengan keikutsertaan dalam bimbingan teknis, pada:

hari, tanggal : Senin, 24 Oktober 2022
waktu : 09.30-16.30 WIB
tempat : Hotel Harris Vertue, Jalan Hayam Wuruk No. 6, Jakarta 10120.

Mengingat pentingnya kegiatan tersebut, besar harapan kami kiranya Bapak/Ibu atau pejabat yang mewakili dapat menghadiri kegiatan dimaksud dengan biaya transportasi dan uang saku *fullday* ditanggung oleh instansi pengirim.

Atas perhatian dan kerja sama baik yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pembinaan Penerjemah
Sekretariat Kabinet,



Sri Wahyu Utami

Tembusan:
Yth. Deputi Bidang Administrasi

Narahubung: Sdr. Fiska Suci Utami (0838 1993 2787)

Lampiran I Surat
Kepala Pusat Pembinaan Penerjemah
Nomor : B. 1177 /PUSBINTER/10/2022
Tanggal : 09 Oktober 2022

DAFTAR PEJABAT YANG DIUNDANG

1. Direktur Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan HAM;
2. Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI;
4. Kepala Biro Umum, Hukum, dan Pengadaan Sekretariat Kementerian, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI;
5. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI; dan
6. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur, Sekretariat Jendral Dewan Perwakilan Rakyat RI.

Jakarta, 09 Oktober 2022

Kepala Pusat Pembinaan Penerjemah,



Lampiran IV
Laporan Forum Konsultasi Publik Tahun 2022

**Notulensi Forum Konsultasi Publik
Jakarta, Senin, 24 Oktober 2022**

- A. Hasil diskusi pada SESI I dengan narasumber Bapak Sugeng Hariyanto, Dosen Politeknik Negeri Malang adalah sebagai berikut:
1. Beberapa pendekatan dalam melakukan penilaian terjemahan, sebagai berikut:
 - a. *The Language-oriented Approach*;
 - b. *The Cross-cultural Approach*;
 - c. *The Interpretive Approach*;
 - d. *The Text-Typological Model*;
 - e. *The Hermeneutic Model*
 - f. *The Rhetorical Model*
 - g. *Functional approach*

Sebenarnya semuanya dipertimbangkan, tetapi penekanannya ada di *language oriented approach* dan *functional approach*
 2. Beberapa tipe penilaian pada terjemahan professional
 - a. Object: Mengukur kompetensi professional penerjemah.
 - b. Type:
 - 1) Mempertimbangkan hasil akhir (product), pengetahuan (quantitative), skills (prosedur), attitude (qualitative).
 - 2) Memperhatikan kualitas dan kuantitas
 - c. Function:
 - 1) Summative: keputusan lulus atau tidak lulus
 - 2) Formative: *to obtain information*, tidak melibatkan lulus atau tidak lulus, tapi *feedback* utk perbaikan,
 - d. Aim:
 - 1) Untuk merekrut penerjemah dan profitabilitas
 - 2) Untuk penelitian
 - e. Mean:
 - 1) *Correcting scale*: Skala/acuan untuk mengidentifikasi kategori kesalahan dan menerapkan simbol berdasarkan kesalahan sehingga peserta bisa memperbaiki. Formatif (feedback)
 - 2) *Grading scale*: Skala acuan penilaian untuk mengidentifikasi dan memberi nilai. Sumatif (lulus/tidak lulus).
 3. Kriteria yang dinilai dalam penilaian kompetensi penerjemah:
 - a. Kompetensi penerjemahan:
 - 1) Kemampuan dwibahasa;
 - 2) Pengalihan pesan;
 - 3) Kemampuan teori;
 - 4) Kemampuan instrumental, dll.
 - b. kompetensi penerjemah:
 - 1) Kerja sama;
 - 2) Etika,
 - 3) Integritas dll.
 4. Tahapan pengukuran kompetensi penerjemah:
 - a. daftar kompetensi;
 - b. setiap elemen diukur dalam soal tes;
 - c. Ada sistem penilaian, sehingga reliable dari waktu ke waktu.
 5. Unsur penilaian kompetensi penerjemahan melalui tes/ujian yang baik mencakup sebagai berikut:
 - a. Validity : mengukur yang seharusnya diukur;

- b. Reliability : dapat diandalkan karena konsisten dalam pengukuran kemampuan;
- c. Objectiveness : tidak melibatkan opini pribadi dan bias dari penilainya.
- d. Usability/Practicality

6. Menurut Zainul dan Nasution (2001) pengukuran kompetensi memiliki dua karakteristik utama yaitu:
- a. Penggunaan angka atau skala tertentu.
 - b. Menurut suatu aturan atau formula tertentu

B. Hasil diskusi pada SESI II dengan narasumber Ibu Ida Kusuma Dewi, Dosen Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sebelas Maret dan Bapak Rasus Budhyono, Dosen Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran adalah sebagai berikut:

1) Bapak Rasus Budhyono:

- a. Menyampaikan pentingnya pemilihan model pengukuran mutu hasil terjemahan (TQM) yang tepat;
- b. Cara mengetahui model pengukuran mana yang tepat adalah dengan pertanyaan berikut:
 - 1) Model apa yang diadopsi?
 - 2) Apa yang menjadi kebutuhan?
 - 3) Model penilaian mana yang sesuai dengan kompetensi yang kita butuhkan?
- c. Skor TOEFL yang tinggi tidak berkorelasi dengan kemampuan menerjemahkan karena TOEFL diperuntukan guna mengukur kesiapan seseorang untuk menempuh pendidikan di luar negeri;
- d. Harus menentukan kriteria penerjemah terlebih dahulu untuk dijadikan standar per jenjang jabatan;
- e. Pertimbangkan untuk mengembangkan kompetensi penerjemah berdasarkan pengukuran mutu hasil terjemahan;
- f. Kembangkan bank soal terkait uji kompetensi penerjemah;
- g. Lakukan kalibrasi model pengukuran yang digunakan (validitas, reliabilitas, dan konsistensi).

2) Ibu Ida Kusuma Dewi:

- a. Pertimbangkan untuk menyelenggarakan *translator competence based training*;
- b. Praktik menggunakan *case based approach*, sehingga tidak hanya melihat makna terjemahannya;
- c. Pengenalan atau peningkatan keterampilan penggunaan teknologi sebagai alat bantu dalam menerjemahkan;
- d. Selenggarakan ujikom yang berbahasa yang produktif, bukan *receptive*;
- e. Tes menerjemahkan disertai anotasi catatan dari penerjemah mengenai strategi serta landasan yang digunakan dalam mengambil keputusan;
- f. Jika dalam ujikom diperbolehkan menggunakan referensi dari internet, peserta harus menyerahkan referensi yang digunakan;
- g. Selenggarakan ujikom menggunakan teknologi yang dipakai sebagai alat bantu dalam menerjemahkan.

Foto Forum Konsultasi Publik Tahun 2022





